

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI I DPR RI
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA,
BADAN INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA
SANDI NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI,
PERUM ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN
KOMISI INFORMASI PUSAT)**

Tahun Sidang : 2009-2010
Masa Persidangan : III
Jenis Rapat : Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/tanggal : Rabu, 16 Juni 2010
Waktu : Pukul 10.00 WIB
Pimpinan Rapat : Kemal Azis Stamboel
Sekretaris Rapat : Dra. Damayanti
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
Acara : 1. Pembukaan
2. Penjelasan Menkominfo
3. Tanya Jawab
4. Penutup
Hadir : 45 orang dari 45 orang Anggota Komisi I DPR RI
Pemerintah : Menteri Komunikasi dan Informatika, Ir. Tifatul Sembiring, beserta jajaran

I. PENDAHULUAN

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Komunikasi dan Informatika, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2010 dengan acara sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI, Kemal Azis Stamboel, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN

1. Sehubungan dengan adanya rencana merger dua penyelenggara jasa telekomunikasi, Komisi I DPR RI minta Menkominfo untuk melakukan kajian dan koordinasi lebih lanjut dengan dua penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut, agar langkah merger tidak menjurus kepada jual beli sumber daya nasional frekuensi yang akan merugikan kepentingan negara.
2. Terkait dengan rencana DPR RI untuk melakukan revisi terhadap UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan revisi terhadap UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Komisi I DPR RI minta Menkominfo untuk berpartisipasi memberikan masukan dan saran terkait dengan revisi kedua UU tersebut, dan segera menyelesaikan draft RUU tentang Konvergensi.
3. Sehubungan dengan masuknya RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang merupakan RUU Inisiatif Pemerintah, Komisi I DPR RI minta Menkominfo untuk segera menyampaikan RUU tentang Tindak Pidana Teknologi Informasi tersebut kepada DPR RI agar dapat segera dilakukan pembahasan bersama-sama dengan Komisi I DPR RI.
4. Menindaklanjuti adanya wacana penggabungan LPP TVRI dengan LPP RRI sekaligus menindaklanjuti hasil Panja LPP TVRI Komisi I DPR RI, Komisi I DPR RI bersama Menkominfo akan mengkaji kembali kemungkinan rencana penggabungan LPP tersebut, agar keberadaan LPP menjadi lebih efisien dan efektif dalam masa sidang yang akan datang.
5. Berkaitan dengan kasus video asusila, Raker menyimpulkan sebagai berikut:
 - a. Sehubungan dengan adanya kasus video asusila yang disertai penyebarannya secara luas di masyarakat, dengan merujuk pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya, seperti UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan UU tentang Pornografi, Komisi I DPR RI minta Menkominfo dalam menangani permasalahan tersebut senantiasa berkoordinasi dngan Kementerian Ristek, Kementerian terkait lainnya, serta Polri dan Komnas HAM Perlindungan Anak, agar ke depan Kemkominfo mampu mengantisipasi kejadian serupa yang berpotensi merusak moral bangsa khususnya anak-anak.

- b. Komisi I DPR RI minta agar Kemkominfo kedepan bertindak lebih sigap dan cepat dalam menangani kasus video asusila melalui kerja sama dengan penegak hukum dan lembaga terkait lainnya, seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers, sehingga tidak terjadi pembiaran yang justru dapat menimbulkan dampak negatif lebih luas di masyarakat.
- c. Komisi I DPR RI minta Kemkominfo untuk mensosialisasikan secara intensif internet sehat kepada masyarakat, sehingga masyarakat mampu menyaring tayangan media terhadap konten yang dapat merusak ketahanan moralitas bangsa.
- d. Mengingat tugas Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers adalah memastikan bahwa masyarakat mendapatkan tayangan yang informatif dan mendidik, Komisi I DPR RI mendesak KPI dan Dewan Pers untuk menerapkan mekanisme yang tegas dan tepat bagi media yang menayangkan konten yang tidak sehat dengan tetap menjunjung kebebasan pers.
- e. Menyusul dampak negatif dari penyebaran video asusila dan mengantisipasi adanya kejadian serupa di kemudian hari, serya membangun ketahanan moral bangsa, Komisi I DPR RI bersama dengan Kemkominfo akan mengagendakan kembali dalam waktu dekat pembahasan mengenai RPM Konten Multimedia

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

Jakarta, 16 Juni 2010
KETUA RAPAT,

KEMAL AZIS STAMBOEL
A-76